



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA MALANG
UNIT KERJA : DINAS KESEHATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HUSNUL MUARIF
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 801131

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 750.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 114 m²/64 m² di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 383.500.000

1. MOBIL, TOYOTA RUSH 1.5 S AT Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 230.000.000
2. MOBIL, HONDA JAZZ GE8 1.5 S AT CKD Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 95.000.000
3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000
4. LAINNYA, DETROIT SEPEDA GUNUNG Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
5. LAINNYA, WIM CIKLE SEPEDA LIPAT Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
6. MOTOR, HONDA V1J02Q50L1 AT / SEPEDA MOTOR Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
7. MOTOR, HONDA PCX V1 J02Q50L1 AT Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 118.679.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 32.834.416

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.285.013.416



III. HUTANG

Rp. 185.669.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.099.344.416

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.